

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rosyid Al Atok. 2015. *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Malang, Setara Pers.
- Abdul Ghani . 1990. *Hukum Dan Politik*, Jakarta : Ghalia.
- Bagir Manan. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Jakarta, Ind-Hill-Co.
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Peundang-Undangan. tingkat Daerah*. Bandung, Pusat Penerbit Universitas LPPM Islam Bandung Pers.
- Bagir Manan dan Kuntana Mangar.1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara di Indonesia*. Bandung, Penerbit Alumni.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*.Jakarta, Balai Pustaka. Cet Ke-8.
- Daniel Dhakidae. 2003. *Profil Daerah : Kabupaten dan Kota Jilid 2*.Jakarta, Kompas.
- Dessler Gary. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, PT. Prenhallindo.
- E.Y. Kanter. 2011. *Etika Profesi Hukum : Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*. Jakarta, Storia Grafika.
- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*, Russell & Russell. New York.
- Harry Alexander. 2006. *Panduan Rancangan Peraturan Daerah di Indonesia*. Jakarta, PT. XSYS Solusindo.
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*. Jakarta, Sinar Garfika.
- _____. 2011. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* .Jakarta, Sinar Grafika.
- _____. 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.

Jimly Asshiddiqie dan Safa'at, M. Ali.2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima. 1994. Jakarta, Balai Pustaka.

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. 2011. *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Edisi Kelima. Jakarta, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan.

Kresno Budi. 2009. *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Peundang-undangan*. Yogyakarta, Universitas Atmajaya.

Liliana Tedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang, Aneka Ilmu.

Maria Farida dan Indrati Soeprapto.2006. *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*.Yogyakarta : Kanisius.

Naiggollan. 1987. *Pembina Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta, Pertja.

Ni'matull Huda. 2012. *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung, Nusamedia.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah.2011.*Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung, Nusa Pedia.

Nomensen Sinamo .2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, PT Bumi Intima Sejahtera.

Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga–Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indinesia Tahun 1945*.Jakarta, Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro.1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta, Ghalia.

Rudito Bambang, dkk. 2016. *Aparatur Sipil Negara Pendukung Reformasi Birokrasi*. Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama.

Soejono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI-Press.

Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta, Kanisius.

Supriadi. 2008. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukumdi Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa KOPRS dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. Jurnal Hukum

Nuvazria Achir, “Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi”, *Jambura Law Review*, Volume 2 Issue 01, Januari 2020.

Juanda Nawani, dkk, “Kode Etik aparatur Sipil Negara,” *Kritis: Journal Unhas*, Volume 5 No. 1, Juni 2019.

Tri Wahyuni, dkk. “Penguatan Kode Etik Organisasi dalam Mewujudkan Netralitas ASN” *Jurnal Administrasi Publik*. Volume XIV No. 2, Desember 2018.

D. Media Online

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten-pesisir-selatan>. Wikipedia, Kabupaten Pesisir Selatan.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/aparatur-sipil-negara>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c12327/apakah-kode-etik-termasuk-peraturan-peundang-undangan/>

